

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian orang lain dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Akuntansi

Menurut Thomas sumarsan (2011:2), pengertian akuntansi adalah:

“Suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Dari pengertian diatas, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pengertian akuntansi adalah :

1. Seni,
2. Pengumpulan data,
3. Pengidentifikasian,
4. Pengklasifikasian,
5. Pencatatan, serta
6. Informasi.

Terdapat Para pemakai informasi dalam akuntansi dan fungsi akuntansi dalam perusahaan menurut Thomas sumarsan (2011: 2), antara lain:

1. Pihak internal perusahaan, pihak internal perusahaan antara lain:
 - A. Karyawan, dan
 - B. Manajemen perusahaan
2. Pihak eksternal perusahaan, antara lain:
 - A. Kreditur
 - B. Pemasok
 - C. Penanam modal
 - D. Calon penanam modal
 - E. Pemerintah

Para pemakai informasi akuntansi memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menganalisis dan fungsi dari laporan akuntansi pun berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Dengan semakin kompleksnya masalah perusahaan yang didorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi. Menurut Thomas sumarsan (2011: 4), akuntansi ini dapat dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:

1. Akuntansi keuangan
2. Akuntansi Pemeriksaan
3. Akuntansi perpajakan
4. Akuntansi manajemen
5. Akuntansi biaya
6. Akuntansi anggaran
7. Akuntansi internasional
8. Sistem informasi akuntansi, serta
9. Akuntansi forensic

Siklus didalam akuntansi dimulai dari adanya transaksi dalam perusahaan. Transaksi menghasilkan dokumen. Berdasarkan dokumen dilakukan pencatatan kedalam buku jurnal lalu dipindahkan atau di *posting* kedalam buku

besar sampai dihasilkan neraca saldo percobaan (*Trial Balance*). Dari neraca saldo tersebut dapat disusun laporan keuangan ataupun dapat dibuat dulu jurnal penyesuaian sebelum laporan keuangan.

Laporan keuangan dalam akuntansi ada beberapa jenis, antara lain:

1. Laporan rugi laba
2. Laporan perubahan modal
3. Laporan neraca
4. Laporan arus kas, serta
5. Catatan atas laporan keuangan

2.1.2 Audit

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal perkembangannya auditing hanya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit semakin penting dan timbul kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analis keuangan, bankir, investor, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan prestasi para manajer. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, timbul audit manajemen sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu

pelaksanaan tanggungjawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Berikut ini beberapa pendapat para pakar mengenai definisi auditing:

Menurut Arens and Loebbecke (2000:9) :

“Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent.”

Menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts* (2001:1-2):

“Audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut William F. Meisser, Jr (2003:8):

“Audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.”

2.1.3 Ruang Lingkup Good Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Kata *governance* berasal dari bahasa Perancis *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *coporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam

konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Jadi pada dasarnya *Good corporate governance* adalah suatu sistem (*input*, Proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Di Indonesia, konsep *corporate governance* diperkenalkan secara resmi pada tahun 1999 ketika Pemerintah membentuk Komite Nasional tentang *Corporate Governance*. Sebagaimana halnya di negara-negara lain di dunia, komite ini melahirkan kode *corporate governance*, yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini ditasbihkan sebagai referensi seluruh perusahaan Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.

Banyak para ahli memaparkan apa itu definisi dari *Good corporate governance*, salah satunya adalah sebagai berikut :

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Amin widjaya tunggal (2011:156) :

“Corporate Governanace adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan dan masyarakat sekitar”

Sedangkan Menurut Forum *corporate governance* Indonesia/FCGI (2001:22):

“*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang

kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *good corporate governance* dipertegas dengan keluarnya keputusan Menteri BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian *good corporate governance* berdasarkan keputusan ini adalah :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan nilai etika.”

Yang dimaksud organ disini adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), komisaris dan direksi untuk perusahaan perorangan (persero) dan pemilik modal, dewan pengawas dan direksi untuk perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan), sedangkan *stakeholders* adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham maupun pemilik modal, komisaris maupun pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak yang berkepentingan.

Dari beberapa definisi teori yang diberikan diatas dapat dijelaskan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ekstern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan

perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder*. *Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *corporate governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan semaksimal mungkin, sehingga tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

Menurut Achmad Daniri (2005:8), beberapa aspek penting dari *good corporate governance* yang perlu dipahami dalam berbagai kalangan bisnis, yakni:

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya RUPS, Komisaris dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- b. Adanya pemenuhan tanggungjawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan peraturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Diantaranya tanggung jawab pengelola atau pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam.

Indikator penilaian Good Corporate Governance adalah seluruh perusahaan yang menerapkan GCG serta masuk daftar pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* hasil survei *Indonesian Index Corporate Governanace (IICG)* dan majalah SWA yaitu terdiri dari penilaian: *Self Assessment*, Dokumen, Makalah dan Observasi (Gabriela Cynthia :2013).

2.1.3.2 Sejarah Good Corporate Governance

Kesadaran mengenai perlu adanya *corporate governance* mulai tumbuh di Inggris tahun 1992, ditandai dengan dikeluarkannya peraturan tata kelola perusahaan oleh *Bank of England* dan Bursa London yang diketuai oleh *Sir Adrian Cadbury*. Setelah itu penerapan *Good Corporate Governance* mulai menyebar ke Eropa, Amerika dan Australia.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kepada pemilik telah lama dikenal dalam *Agency Theory* atau *Stewardship*. Kemudian dikembang dalam teori Birokrasi Weber (dikutip oleh Media Akuntansi 2000). Dalam sejarah peradaban dunia bisnis. GCG sudah dipraktekan dilingkungan perusahaan-perusahaan di America kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, agar perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola suatu Negara (*Little Republic*). Oleh Karena itu, seringkali perusahaan disebut suatu miniatur Negara. Pola GCG kemudian diikuti oleh Negara-negara di Eropa hingga seluruh dunia (Yada Braguna, 2000).

Istilah *Corporate Governance* itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 Robert I. Tricker, memandang *corporate governance* mengemukakan *Agency Theory* adalah salah satu teori yang dapat menggambarkan *corporate governance*. Perusahaan ditampilkan sebagai suatu kontrak antar pemilik dan dimana pemegang saham sebagai pemilik dan para direktur sebagai agennya. *Agency Theory* menyatakan bahwa agen dalam hal ini

akan bekerja sejenak dirinya secara rasional, bukan dengan bijaksana, dan asumsi lainnya seperti yang terdapat dalam model *stewardship*.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih bagus karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Negara Indonesia mulai mengadopsi penerapan *Good Corporate Governance* setelah adanya krisis pada tahun 1999 dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Komite Nasional *on corporate governance* pada tanggal 19 agustus 1999 melalui surat Keputusan Menko Ekuin nomor: Kep. 10/M. EKUIN/08/1999.

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Pendirian suatu organisasi sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut organisasi bisnis yang pastinya ada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut. Selanjutnya semua itu tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tatakelola perusahaan yang baik GCG (*Good Corporate Government*).

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 prinsip *Good Corporate Governance*, merupakan :

“Kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat”.

Menurut Achmad Daniri (2005:9), Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri atas :

- A. Transparansi (*Transparency*)
- B. Akuntabilitas (*accountability*)
- C. Responsibilitas (*Responsibility*)
- D. Independensi (*Independency*)
- E. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. *Transparency* (keterbukaan)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholder_nya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja keuangan

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar.

Jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

- a. Praktik audit internal yang efektif, serta
- b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan.
- c. Bila prinsip akuntabilitas ini diterapkan secara efektif, maka kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi benturan kepentingan peran.

3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-lainnya.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Diluar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

4. *Independency* (kemandirian)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman dan praktik di tingkat *corporate board*, terutama ditingkat dewan komisaris dan direksi yang oleh undang-undang didaulat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada

perusahaan terhadap praktik korporasi yang merugikan seperti disebutkan diatas. Dengan kata lain *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG diatas ini menyarankan perusahaan dalam menjalankan aktifitas agar memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan. Kesetaraan maksudnya adalah sebuah perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyatakan pendapatnya demi kepentingan perusahaan dan perusahaan harus memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pekerja tanpa diskriminasi.

2.1.3.4 Pihak Yang Berperan Dalam *Good Corporate Governance*

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat didefinisikan secara luas dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara Manajer, Direktur, dan Pemegang Saham. Sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Menurut YPPMI (2002:23) , Struktur Umum Suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia, adalah :

- A. Komite Audit
- B. Komisaris
- C. Direksi

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

A. Komite Audit

Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Komite audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap fungsi pelaksanaan direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.

Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi Komite Audit tidak dapat dipisahkan integritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan *Internal Auditor*.

B. Komisaris

Komisaris harus mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan. Komisaris Berdasarkan UU PT diharuskan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan hukum Komisaris ataupun RUPS diberi wewenang untuk menskors (memberhentikan sementara) anggota Direksi. Komisaris sama-sama dengan Direksi, harus menandatangani laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, turut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan yang karenanya menyebabkan kerugian

kepada pihak manapun. Setiap anggota dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan UU PT, setiap kepentingan kepemilikan saham yang dipegang olehnya atau keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lainnya. Namun, pelaksanaan tanggung jawab Komisaris tersebut hingga kini dinilai sangat Langka

C. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh UU PT untuk menjalankan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota secara pribadi bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. Direksi wajib mengadakan pembukaan perusahaan, mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS tahunan suatu laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan di samping mengadakan dan memelihara daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS. Seorang anggota Direksi juga harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan pasal 87 UU PT, setiap kepentingan pemegang saham yang dipegang olehnya atau oleh keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lain. Direksi berkewajiban mematuhi Pasal 34 UU Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan menyelenggarakan dan memelihara daftar.

Pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham para anggota Direksi dan Komisaris serta keluarga mereka didalam perusahaan tersebut dan atau di perusahaan-perusahaan lainnya berikut

pencatatan tanggal saham-saham itu diperoleh atau dilepaskan. Direksi wajib menyediakan Daftar Pemegang Saham pada Kantor perusahaan. Menurut peraturan-peraturan yang berlaku suatu perusahaan yang terdaftar di bursa saham diharuskan untuk mengangkat seorang *corporate secretary*, dimana *corporate secretary* tersebut bertugas sebagai penghubung investor (*investor relation office*). Di samping itu, juga sedang diusulkan di mana *corporate secretary* juga bertindak sebagai petugas ketaatan (*compliance officer*) dan pemegang dokumen-dokumen perusahaan seperti Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus perusahaan, termasuk pula risalah rapat setiap RUPS. Salah seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai *corporate secretary*.

2.1.3.5 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

2.1.3.5.1 Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki andil yang besar dan manfaat yang bisa membuat perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Penerapan GCG pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *change management* yang signifikan di perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan GCG yang cenderung pada aspek *compliance* perlu diramu sedemikian rupa menggunakan pendekatan *change management*, agar perubahan ini dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari *corporate culture*. Hal ini memunculkan fenomena perlunya *change management* dan GCG dipadu padankan agar menjadi *corporate culture*.

Menurut Mas Achmad Daniri (2005:4) manfaat dari penerapan GCG bagi perusahaan adalah :

“Diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian suatu negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju kearah yang lebih sehat, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh yang diikuti oleh pulihnya kepercayaan investor”

Manfaat penerapan *good corporate governance* dalam pedoman *Good Corporate Governance* (2006:2) adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan perusahaan.
- b. Memberikan keyakinan bahwa perusahaan dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan hasil yang wajar dan bernilai tinggi sehingga memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat, baik secara nasional maupun international.
- c. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
- d. Mendorong pengelolaan resiko dan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif.
- e. Mendorong agar setiap unsur pimpinan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perusahaan terhadap *stakeholders*.
- f. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
- g. Mencegah terjadinya pengimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Sedangkan menurut IICG (2009), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah:

1. Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *Cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan

Berikut ini adalah uraian dari manfaat penerapan GCG :

1. Meminimalkan *agency cost*.

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadang kala akan

menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Jadi pada intinya, banyak manfaat dari penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah, antara lain:

- Mempertahankan kesinambungan perusahaan.
- Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar
- Mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*
- Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.
- Melindungi organisasi dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
- Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.
- Memetakan masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam rangka dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan di mata para investor, hal ini tentunya menjadi nilai tambah perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

2.1.3.5.2 Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan dari *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:34) adalah :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan-kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan

Sedangkan Penerapan *Good corporate Governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-11/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010: 53), yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirianorgan.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Sedangkan menurut Eka Hardikasari (2011) tujuan dari *good corporate governance* adalah:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.

3. Meningkatkan kinerja perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dewan pengurus atau *board of directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of directors* dengan manajemen perusahaan.

Jadi pada intinya, tujuan good corporate governance adalah Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang serta bagaimana melindungi para pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta manajemen dalam organisasi, kemudian peningkatan kualitas hubungan antara *stakeholders* dengan manajemen perusahaan.

2.1.3.6 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme GCG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi.

Menurut Deby Natalia (2013), bahwa:

“Mekanisme *good corporate governance* pada dasarnya mencakup beberapa hal yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi serta komisaris independen.”

Berikut ini penjelasan mengenai mekanisme *good corporate governance*:

1. Kepemilikan Manajerial

Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Dengan demikian diharapkan dengan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer. Adapun hubungan struktur kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan merupakan hubungan *non-monotonik*, yaitu hubungan yang timbul karena adanya insentif yang dimiliki manajer dan mereka berusaha untuk melakukan penyesuaian kepentingan dengan pemilik dari pihak luar perusahaan dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan meningkat.

Ada beberapa pengertian kepemilikan manajerial yang diuraikan oleh beberapa peneliti, antara lain:

Wahidawati (2002) menyatakan bahwa :

“Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan.”

Lemons dan Lins (2001) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan manjeril dapat diartikan semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial akan menurunkan market value, penurunan ini diakibatkan karena tindakan opportunistik yang dilakukan oleh pemegang saham manajerial.”

Marcus, Kane dan Bodie (2006:8) menyatakan bahwa

“Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegng saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.”

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham yang terdiri dari direktur dan komisaris yang diukur dari presentase jumlah saham dari manajemen, dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan lebih mementingkan dirinya sendiri.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didalam suatu perusahaan mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opporunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen maka akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Ada beberapa pengertian kepemilikan institusional yang diuraikan oleh beberapa peneliti, antara lain:

Fruest dan Kang (2000), kepemilikan institusional dapat diartikan

“Semakin tinggi kepemilikan institusi akan meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.”

Menurut Faisal (2004), kepemilikan institusional merupakan:

“Pihak yang memonitor perusahaan. Dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar. Artinya semakin besar kepemilikan institusi maka semakin efisiensi pemanfaatan aktiva perusahaan sehingga dapat mencegah tindakan pemborosan yang dilakukan manajemen dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.”

Marcus, Kane dan Bodie (2006:9) menyatakan bahwa:

“Seluruh pemegang saham mungkin sepakat bahwa manajemen perusahaan harus memilih strategi yang dapat meningkatkan nilai saham mereka. Kebijakan tersebut akan membuat kekayaan para pemegang saham bertambah dan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan pribadi mereka, dengan adanya kepemilikan institusional didalamnya dapat memonitor perusahaan.”

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan, kepemilikan institusional dalam perusahaan bertindak sebagai alat

untuk memonitor perusahaan yang digunakan untuk mencegah manajemen dalam melakukan pemborosan atau memperkaya diri sendiri.

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan anggota manajemen, pemegang saham minoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan dengan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa :

“komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*”.

4. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah ukuran (jumlah) dewan direksi pada sebuah perusahaan. Dimana dewan direksi (direktur) merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin sebuah perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan direksi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, berapa banyak dewan yang dibutuhkan dalam perusahaan? Apakah dengan semakin banyaknya dewan berarti perusahaan dapat meminimalisasi permasalahan agensi antara pemegang saham dan direksi? Jumlah dewan direksi yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah

bahwa perusahaan akan bergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik.

Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal yakni meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Yermack, 1996).

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, selain itu kinerja keuangan pada dasarnya berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan pada suatu periode tertentu. Banyak para ahli yang mengemukakan penjelasan dari kinerja keuangan, berikut ini penjelasan kinerja keuangan menurut para ahli :

Menurut Mulyadi (2001:178):

“Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Sedangkan menurut Syafarudin (2003:96) :

“Kinerja keuangan merupakan analisis mengukur sampai sejauh mana prestasi, peningkatan, posisi atau *performance* dari nilai perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan baik neraca ataupun laba rugi”

Kemudian pengertian kinerja keuangan Menurut Sukhemi (2007:23) :

“Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

Kinerja keuangan menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Untuk itu perlunya kita mengetahui pengertian dari kinerja keuangan itu sendiri.

Jadi kesimpulannya, kinerja keuangan adalah suatu tampilan tentang kondisi *financial* perusahaan selama periode waktu tertentu. Dimana untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data-data non keuangan lain yang bersifat sebagai penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan

berupa neraca, rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang dapat memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan.

2.1.4.2 Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha ataupun proyek. Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan puncak suatu usaha sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini maka manajemen dapat memutuskan berbagai keputusan manajemen misalnya :

- Melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha.
- Melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi
- Melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi
- Melakukan penerbitan saham atau melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank guna meningkatkan modal kerja perseroan.
- Berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan.

Dalam penyajian laporan keuangan terdapat banyak sekali analisis. Analisis laporan keuangan bertujuan antara lain, untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan, untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja anggaran, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan atau penyempurnaan dimasa yang akan datang dan sebagainya.

Indra Bastian dan Suhardjono (2006:284) Metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan antara lain:

- Analisis Varians
- Analisis Komparatif
- Analisis Lingkungan
- Analisis Rasio

Berikut ini adalah uraian dari metode analisis laporan keuangan :

1. Analisis varians (*variance analysis*), yaitu metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi terjadinya deviasi.
2. Analisis komparatif (*comparative analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan keragaman usaha bank pada suatu periode dengan periode lainnya, baik secara absolut maupun relatif atas total/bagian tertentu.

3. Analisis lingkungan (*environment analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di wilayah kerjanya.
4. Analisis rasio (*ratio analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi.

Banyak analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, menurut Ruddy Tri Santoso (1995:87):

“Salah satu analisis yang digunakan adalah analisis rasio. Hal ini dikarenakan, analisis rasio merupakan teknik analisis yang sering dipakai karena merupakan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. “

Masing-masing rasio tersebut mempunyai kegunaanya tergantung posisi keuangan yang akan dilihat. Analisis rasio keuangan sangat diperlukan bagi penilaian prestasi suatu usaha yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan, terutama bagi manajemen dalam penyusunan kebijakan Analisis rasio tersebut diharapkan sangat membantu dalam mengadakan analisis kondisi intern pada umumnya.

Berdasarkan analisis rasio keuangan akan didapat informasi yang lebih mudah dibaca dan ditaksirkan daripada laporan keuangan, juga dapat diketahui bagaimana perkembangan aktivitas perusahaan sebagai cerminan kinerja manajemen di masa lalu, di masa sekarang dan untuk kecenderungannya di masa yang akan datang berdasarkan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Jenis-jenis analisis laporan keuangan

yang digunakan pun bermacam-macam sesuai dengan kondisi perusahaan, secara umum ada lima analisis rasio yang biasanya digunakan, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas.

Analisis rasio menurut Menurut Bambang Riyanto (2001:329) mengenai definisi rasio keuangan yaitu:

“Rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial.”

Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowiz (1997:133) yaitu:

“Indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.”

Kesimpulannya analisis rasio adalah suatu perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan dan menjelaskan hubungan antara dua data laporan keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu yang dinyatakan dalam *arithmetical terms*, dimana data yang dibandingkan adalah data yang berasal dari laporan keuangan baik neraca, laporan rugi laba, maupun perubahan modal.

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakan rasio keuangan Fahmi (2011: 47), yaitu :

- a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan;
- b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan;
- c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan;
- d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan

- adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman;
- e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stockholder* organisasi.

Jenis-jenis analisis rasio yang biasanya digunakan dalam mengukur kinerja keuangan antara lain:

1. Analisa Likuiditas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat dihitung berdasarkan informasi modal kerja pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Beberapa jenis rasio likuiditas antara lain:

a. Current Ratio

Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung current rasio adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Kewajiban Lancar}$$

b. Cash Ratio atau Ratio of Immediate Solvency

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid (*liquid assets*). Rumusannya adalah sebagai berikut: *Cash Ratio* = (Kas + Efek)/Kewajiban Lancar

c. Quick Ratio atau Acid Test Ratio

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan

aktiva lancar yang lebih liquid (liquid assets), rumus quick ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = (\text{Kas} + \text{Efek} + \text{Piutang}) / \text{Kewajiban Lancar}$$

2. Analisis rasio Solvabilitas atau Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Data yang dipergunakan untuk analisis leverage adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi. Rasio Leverage diantaranya adalah :

a. Total Debt to Equity Ratio

Ratio ini digunakan untuk mengukur bagian modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau hutang.

Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut :

$$\text{TD Equity} = (\text{Hut. Lancar} + \text{Hut. Jangka Panjang}) / \text{Jumlah Modal Sendiri}$$

b. Total Debt To Total Capital Assets

Ratio ini digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban atau hutang. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{TD Capital Assets} = (\text{Aktiva Lancar} + \text{Hutang Jangka Panjang}) / \text{Jml Aktiva}$$

3. Analisis rasio aktivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdaya yang dimiliki.

Rasio Aktivitas diantaranya adalah :

a. *Total Assets Turnover*

Total Assets Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan “revenue”. Rumusnya sebagai berikut :

$$\textit{Total Assets Turnover} = \text{Penjualan Bersih} / \text{Total Aktiva}$$

b. *Receivable Turnover*

Receivable Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang tertanam dalam piutang yang berputar pada suatu periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut :

$$\textit{Receivable Turnover} = \text{Penjualan Kredit} / \text{Piutang Rata-rata}$$

4. Analisis rasio profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Rasio Profitabilitas atau disebut juga dengan istilah Rentabilitas diantaranya adalah:

- a. Analisis *Return on Equity (ROE)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\textit{Return on Equity} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Modal Sendiri.}$$

- b. Analisis Rasio *Return on Asset (ROA)*, adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih.

Rumusny sbb :

$$ROI = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Jumlah Aktiva}$$

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis profitabilitas, menurut Sartono (2001:119) mendefinisikan:

“Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas *Profit Margin, Basic Earning Power, Return On Assets*, dan *Return On Equity*.”

Tingkat profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, hal ini dilakukan mengingat daya tarik bisnis (*business attractiveness*) merupakan salah satu indikator penting dalam persaingan usaha, sedangkan indikator daya tarik bisnis dapat diukur dari profitabilitas usaha, seperti ROA, ROE dan NPM. Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru untuk masuk dalam dunia usaha, sehingga pada kondisi persaingan tersebut akan membuat *rate of return* cenderung mengarah pada keseimbangan. Daya tarik bisnis yang semakin tinggi akan mendorong pendatang baru untuk masuk dalam dunia usaha sehingga laba abnormal lambat laun akan kembali menurun menuju laba normal.

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas

pemegang saham. ROE merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari ekuitas. Semakin besar hasil ROE maka kinerja perusahaan semakin baik. Rasio yang meningkat menunjukkan bahwa kinerja manajemen meningkat dalam mengelola sumber dana pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih (profitabilitas meningkat).

2.1.4.3 Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Tahap-tahap analisis kinerja adalah suatu tata aturan yang sistematis yang dilakukan oleh perusahaan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis rasio keuangan perusahaan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan, dimana tahap-tahap tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan agar hasil yang diinginkan dan diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai, mengenai keakuratan data analisis dan hasil analisis nantinya. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan.

menurut Fahmi (2011: 2), ada lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

- 1) Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan *Review* disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melakukan perhitungan Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
- 3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut

kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lain. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu :

- a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
- 4) Melakukan penafsiran (*interpretasi*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami perusahaan tersebut.
 - 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan aturan-aturan dalam manajemen perusahaan yang baik dan benar.

2.1.4.4 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Sedangkan menurut Darmawati(2006) dalam Putri (2006), tujuan penilaian

kinerja adalah:

- 1) Untuk keperluan merger dan akuisisi perusahaan akan melakukan penggabungan usaha atau mengakuisisi perusahaan lain, jelas memerlukan kegiatan penilaian untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan.
- 2) Untuk kepentingan restrukturisasi dan kepentingan usaha, perusahaan yang bermasalah seringkali memerlukan penilaian untuk mengimplementasikan program pemulihan usaha atau restrukturisasi untuk mengetahui nilai perusahaan dan nilai likuiditasnya.
- 3) Untuk keperluan divestasi sebagai saham perusahaan dari mitra strategis.
- 4) Untuk *Initial Public Offering (IPO)*, dimana perusahaan yang akan menjual sahamnya pada umum atau bursa, harus dinilai dengan menggunakan penilaian yang wajar untuk ditawarkan kepada masyarakat atau publik.
- 5) Untuk memperoleh pendapat wajar atas penyertaan dalam suatu perusahaan atau menunjukan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada didalam neraca.
- 6) Untuk memperoleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.

Jadi kesimpulannya tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.5. Profitabilitas

2.1.5.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas, menurut Sartono (2001:119) mendefinisikan:

“Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas *Profit Margin*, *Basic Earning Power*, *Return On Assets*, dan *Return On Equity*.”

2.1.5.2 Pengertian Rasio Profitabilitas

Analisis rasio profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Rasio Profitabilitas atau disebut juga dengan istilah Rentabilitas diantaranya adalah:

- A. Analisis *Return on Equity (ROE)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Return on Equity} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Modal Sendiri.}$$

- B. Analisis Rasio *Return on Asset (ROA)*, adalah analisi yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Rumusnya sbb :

$$\text{ROI} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Jumlah Aktiva}$$

Indikator pengukuran kinerja keuangan perusahaan pada penelitian ini menggunakan analisis ROE(*Return on Equity*) . Rasio profitabilitas dan analisis *Return on Equity* ini dipilih karena analisis ini tepat untuk melihat sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri, serta bisa menggambarkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan dari sebuah perusahaan (Breassley, 2008:82).

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan banyak di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal perusahaan. Menurut Gabriela Cynthia Windah (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Komposisi kepemilikan aktiva,
2. Ukuran perusahaan,
3. Tingkat inflasi,
4. Harga jual komoditi,
5. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan,
6. Kesempatan bertumbuh perusahaan,
7. Nilai tukar kurs rupiah, serta
8. *Good Corporate Governance*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan dalam dunia usaha di era *globalisasi* ini mengakibatkan persaingan yang ketat antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Persaingan antar perusahaan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa hindari oleh setiap perusahaan. Akibat persaingan yang kompetitif ini, menyebabkan perusahaan harus terus selalu meningkatkan profitabilitas perusahaan demi tetap eksis dalam persaingan dunia bisnis tersebut.

Salah satu faktor yang paling penting adalah faktor tata kelola perusahaan atau GCG, dimana faktor ini mencerminkan yang menjadi landasan pengelolaan usaha yang sehat, agar harapan para *stakeholders* dapat dipenuhi secara keseluruhan. Kinerja keuangan yang baik tentunya memerlukan modal yang baik pula, antara lain bagaimana caranya perusahaan mendapatkan investor sebagai penanam modal agar perusahaan tetap bisa menjalankan aktivitas operasionalnya.

Menurut Forum *corporate governance* Indonesia/FCGI (2001:22):

“*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

GCG merupakan rangkaian Seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan hak di sini adalah hak seluruh stakeholder, bukan terbatas kepada shareholder saja. Karena itu fokus utama disini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency, responsibility, accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Prinsip-prinsip GCG diatas ini menyarankan perusahaan dalam menjalankan aktifitas agar memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan. Kesetaraan maksudnya adalah sebuah perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyatakan pendapatnya demi kepentingan perusahaan dan perusahaan harus memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pekerja tanpa diskriminasi.

Kemudian mekanisme GCG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan *control* atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya *Corporate governance* dalam sebuah organisasi Walsd dan Steward yang dialih bahasakan dalam

(Arifin: 2005). Mekanisme *good corporate governance* pada dasarnya mencakup beberapa hal yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi serta komisaris independen.

Menurut Amin widjaya tunggal (2013:156) ada hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan perusahaan :

“*Corporate Governanace* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham. “

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabriela Cynthia (2013), diperoleh adanya pengaruh dan hubungan antara *good corporate governance* dengan profitabilitas perusahaan, dimana GCG di proleh dari pemeringkatan yang dilakukan oleh IICG, serta profitabilitas di ukur dengan analisis rasio yakni *Return on Equity* (ROE).

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi perusahaan selama suatu periode waktu tertentu. Kinerja keuangan ini dilihat dari satu periode ke periode berikutnya apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya. Selain itu, kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh para investor dalam mengambil keputusan, apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak.

Profitabilitas, menurut Sartono (2001:119) mendefinisikan:

“Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas *Profit Margin*, *Basic Earning Power*, *Return On Assets*, dan *Return On Equity*.”

Pengukuran profitabilitas didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. profitabilitas suatu perusahaan pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor baik itu faktor internal maupun eksternal perusahaan diantaranya faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor tersebut antara lain komposisi kepemilikan aktiva, ukuran perusahaan, inflasi, harga komoditi, efisiensi dan efektivitas penngunaan sumber daya perusahaan, kesempatan bertumbuh perusahaan, nilai tukar kurs rupiah maupun *good corporate governance*. Kemudian apakah tata kelola perusahaan yang baik ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan atau tidak.

Dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan mereplikasi penelitian sebelumnya (Gabriela Cynthia, 2013) dengan sampel penelitian yang berbeda dan tahun penelitian yang berbeda. Penelitian ini untuk mengetahui bukti empiris mengenai penerapan *good corporate governance* yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

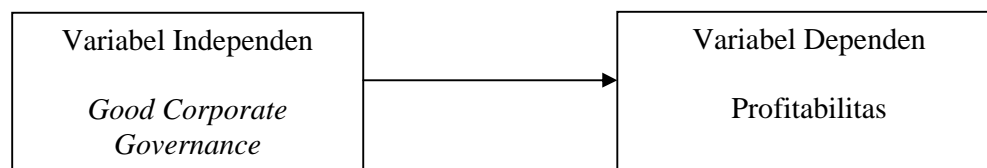
Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Suklimah Ratih (2011)	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA	- Good corporate governance - Nilai perusahaan - Kinerja keuangan	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan

		KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL <i>INTERVENING</i> PADA		
2	Gabriela Cynthia (2013)	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI IICG	<ul style="list-style-type: none"> - Good corporate governance - Kinerja keuangan (ROE, ROA) 	Tidak semua kinerja keuangan terpengaruh oleh GCG, hanya ROE yang positif terpengaruh oleh good corporate governance
3	Ekowati Dyah Lestari (2007)	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI (2007-2009)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - Ukuran dewan direksi, dan komisi independen - Kinerja keuangan 	. –Terdapat pengaruh mekanisme Good corporate governance terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan return on equity
4	Ekki Irawan Putra (2007)	PENGARUH PENERAPAN MEKANISME <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP <i>EARNING MANAGEMENT</i> DI DALAM PERUSAHAAN PERTAMBAHAN PADA BURSA EFEK INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - Ukuran dewan direksi, dan komisi independen - Kinerja keuangan 	Tidak semua kinerja keuangan terpengaruh oleh GCG, hanya ROE yang positif terpengaruh oleh good corporate governance

5	Vesy Novrianti (2004)	PENGARUH <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Good corporate governance - Corporate social responsibility - Kinerja keuangan (ROE) 	Tidak terdapat pengaruh signifikan antara GCG dengan ROE begitupun antara CSR dengan ROE
---	-----------------------	--	--	--

Kerangka Berpikir pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas:



Tabel 2.2

2.3 Hipotesis Penelitian

Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban Sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Menurut Umi Narimawati (2008:63) hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna.

Hipotesis sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, dalam memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis maka penulis akan menguji apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut: Terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas.